

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Provinsi DIY merupakan provinsi yang memiliki otonomi daerah tersendiri, provinsi DIY memiliki keunikan di banding dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, yaitu keistimewaan nya sendiri sudah di atur oleh Negara dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. ¹ Dengan keistimewaan nya itu sendiri dapat di manfaatkan oleh pemerintah daerah DIY untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintahan daerah di manca negara tanpa harus melalui pusat, aturan ini sudah jelas tercantum dalam Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah salah satu pelaku hubungan luar negeri.

¹*undang-undang republic Indonesia* diakses pada(5 september 2013); dalam http://otda.kemendagri.go.id/images/file/uu_diy.pdf

²*Bunga Rampai Kerjasama Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya* (diakses pada 5 september 2013); pada <http://bkd.jogjapro.go.id/page/profil-bkd-provinsi-diy>

Demikian pula undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang 2 Perjanjian Internasional yang mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri² Dengan adanya aturan dan keleluasaan ini, pemerintah provinsi DIY yang notabene memiliki sejarah panjang dan berbagai hal yang dapat di kembangkan oleh pemerintah provinsi DIY berusaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan kota di berbagai manca negara, salah satunya adalah prefektur Kyoto, Kyoto adalah sebuah Prefektur di negara Jepang yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Honshu. ²

Perekonomian Prefektur Kyoto sangat tergantung pada sektor pariwisata. Daerah utara Kyoto terdapat usaha perikanan yang maju, sedangkan di tengah-tengahnya terdapat usaha perkebunan dan perhutanan. Nintendo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan juga berbasis di Kyoto. Latar belakang utama di adakannya kerjasama antara pemerintahan DIY dengan prefektur Tokyo Jepang adalah untuk meningkatkan aspek-aspek unggulan dari kedua daerah untuk memunculkan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan di kedua belah pihak, adapun berbagai aspek-aspek tersebut adalah pengembangan pariwisata dan pendidikan yang di tonjolkan oleh masing-masing daerah agar memunculkan asas manfaat. Selain itu DIY dengan Prefektur Kyoto Jepang telah menjalin hubungan yang dekat sejak lama pada saat Gubernur Kyoto pada waktu itu, Yukio Hayashida yang telah banyak mengetahui kondisi DIY karena sewaktu perang dunia II ditugaskan di DIY, memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan Provinsi DIY. Keinginan tersebut disambut baik oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena adanya hubungan pribadi antara kedua belah pihak.

3Kyoto Prefecture (diakses pada 5 september 2013); pada www.pref.kyoto.jp/

index_e.html

Hubungan kerjasama tersebut mulai resmi dilakukan sejak 16 Juli 1985 bersamaan dengan ditandatangani persetujuan hubungan kerjasama persahabatan antara kedua pemerintah provinsi oleh Sri Paku Alam VIII selaku wakil Gubernur DIY dan Yukio Hayashida selaku Gubernur Prefektur Kyoto. Dengan dibangunnya kerjasama persahabatan bertajuk Sister Province tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak dapat saling membantu dalam berbagai sektor khususnya pariwisata. Pada tanggal 27 Mei tahun 2006 terjadi sebuah bencana alam berupa gempa bumi besar yang melanda DIY dan Jawa Tengah. Dampak terparah dari gempa tersebut adalah di kabupaten Bantul dan Kodya Yogyakarta. 3

Di sinilah sangat terlihat manfaat dari kerjasama dengan Prefektur Kyoto. Bantuan mulai mengalir dari pemerintah Kyoto mulai dari tanggap gempa sampai masa-masa rekonstruksi. Salah satu daerah yang terkena dampak dari gempa bumi tersebut adalah Kotagede salah satu kecamatan di KODYA Jogjakarta, Kotagede terletak sekitar 10 kilometer di sebelah tenggara jantung kota Yogyakarta. Wilayah itu sekarang terkenal dengan nama Kawasan Cagar Budaya (KCB) Kotagede yang merupakan sentra kerajinan perak di Yogyakarta. Sebagai kota tua bekas Ibukota kerajaan, Kota Kotagede merupakan kota warisan (*heritage*) yang di dalamnya terdapat makam Raja-Raja Mataram antara lain makam Panembahan Senopati (Pendiri Mataram). Selain itu, Kotagede juga menyimpan sekitar 170 bangunan kuno yang didirikan pada tahun 1700 hingga 1930.

Berdasarkan keberadaan lanskap sejarah tersebut maka KCB Kotagede ini penting untuk dilestarikan dan dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata sejarah. Tujuan studi ini adalah menyusun lanskap wisata pada KCB Kotagede untuk mendukung interpretasi sejarah awal Kerajaan Mataram Islam, kenyamanan wisata dan kesejahteraan masyarakat setempat.⁴Ini betapa pentingnya Kotagede sebagai kawasan Cagar Budaya, sehingga patut adanya untuk di jaga dan di lestarikan, seiring dengan adanya perjanjian Sister Province atau kerjasama antara pemerintahan DIY dengan prefektur Kyoto Jepang maka di adakan lah kerjasama antara kedua daerah untuk melestarikan kawasan cagar budaya Kotagede, karena merasa memiliki latar belakang yang sama prefektur kyoto Jepang bersedia untuk melakukan penanganan pelestarian kawasan cagar budaya tersebut.

⁴*perencanaan lanskap wisata pada kawasan cagar budaya kotagede, Yogyakarta* (diakses pada 07 september 2013); melalui <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/4>

Sehubungan dengan itu, dalam rangka penyusunan karya tulis dengan mengambil masalah kerjasama di bidang pariwisata maka penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat pada objek-objek tersebut. Sesuai dengan topik masalah yang diambil seperti tersebut diatas, maka judul karya tulis atau skripsi yang dipilih adalah: “Kerjasama Prefektur Kyoto Jepang dengan DIY menangani pelestarian Lingkungan Cagar Budaya di kawasan Kotagede (1985-2014)”. Kerjasama *Sister Province*, yang terlebih dahulu ditemukan dengan nama *Sister City*, merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat Provinsi, Negara Bagian atau Prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua Negara yang berbeda.

Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan Budaya, latar belakang sejarah atau jika dilihat dari segi Geografis kedua daerah sama-sama daerah Pantai atau daerah kepulauan Amerika Utara, Australia dan Asia menggunakan istilah Kerjasama *Sister City/Province* untuk menyebutkannya, sedangkan di Eropa lebih sering menggunakan Kerjasama Kota Kembar. Kerjasama *Sister City* yang pertama kali dalam sejarah adalah di benua Eropa, yaitu antara Keighley, Yorkshire Barat (sekarang berada di Inggris) dengan Poix-dunord, Nord, Perancis pada tahun 1920 menyusul berakhirnya perang dunia pertama. Akan tetapi, kerjasama tersebut belum resmi karena belum mengadakan penandatanganan perjanjian hingga tahun 1986.

⁵*Sister Cities* (diakses pada 3 Agustus 2009); melalui www.japan.go.id/sister_province.

Pada perkembangannya, pada tahun 1956, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Dwight Eisenhower. Melaksanakan program “American Sister City Program” dimana program 5

tersebut memacu daerah-daerah di AS untuk melakukan kerjasama. Kerjasama Sister Province dan Sister City di Indonesia sudah mulai muncul pada tahun 1970-an. Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan, misalnya sama-sama Ibukota Negara, contohnya Jakarta banyak melakukan kerjasama dengan berbagai Ibukota Negara dikarenakan sama-sama Ibukota Negara. Pada tahun 1980-an kerjasama Internasional dalam bentuk Sister Province dan Sister City semakin marak. Pada saat ini lebih kurang 100 kerjasama Internasional yang berbentuk *Sisterhood* telah tercatat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Dari catatan yang ada, mungkin tidak sampai 15% dari kerjasama tersebut yang berjalan dengan baik, dan tidak sampai 20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hampir tidak melakukan kegiatan apapun.⁶Provinsi DIY sebagai salah satu Provinsi yang menyanggah keistimewaan di Negara Republik Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan kebutuhan untuk membina komunikasi dan interaksi serta hubungan kemitraan baik dengan provinsi lain di Indonesia maupun dengan pemerintah negara lain. Pertimbangan yang mendasari tidak semata-mata dalam upaya menjalin hubungan persahabatan yang saling pengertian di antara Provinsi tetapi juga sebagai upaya untuk menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang pelayanan publik⁷. Harus diakui bahwa setiap Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi DIY dan Provinsi di Negara-Negara Manca pada umumnya menghadapi tantangan yang serupa dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kepada Masyarakatnya.

⁶Usmar Salam. 2004. *Dinamika Kerjasama Internasional Provinsi di Indonesia dengan Luar Negeri*. Makalah Lokakarya Cara penanganan Kerjasama Internasional. Hal 7.

Bagi Provinsi DIY tantangan tersebut adalah di satu sisi dihadapkan keterbatasan seperti luas wilayah yang relatif kecil, sumber dana yang terbatas, sumber daya manusia yang masih membutuhkan peningkatan serta kewenangan yang terbatas. Di sisi lain tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam berbagai bidang makin meningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat, tetapi di lain sisi pemerintahan provinsi DIY mensiasati kekurangannya dengan mengembangkan sektor-sektor yang lain, yang apabila di lihat dari spekulasi kacamata bisnis ini cukup menguntungkan, sektor itu adalah bidang pariwisata, mengingat DIY sebagai tujuan wisata bagi wisatawan asing dan domestik menjadi pilihan kedua setelah pulau Bali dari sini DIY mencoba memulai untuk mengeksplorasi segala kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan industri pariwisatanya mulai dari pelestarian budaya yang mencakup berbagai macam pilihan seperti batik, tari-tarian, musik juga tempat-tempat pariwisata yang eksotis, karena DIY di apit oleh Gunung Merapi di ujung utara dan pantai Parangtritis yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Ini seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi turis Mancanegara dan turis domestik, dan bukan hanya itu, karena masih banyak lagi yang bisa di tonjolkan dan di kembangkan salah satunya adalah kawasan cagar budaya Kotagede, Kotagede adalah kecamatan di sisi timur kota Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bantul, dahulu kala Kotagede merupakan tempat dimana berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang menjadi cikal bakal Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada saat ini, di tempat ini terdapat banyak sekali situs-situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam, mulai dari Masjid Agung, Pemandian Raja, hingga kompleks makam para raja. Tidak hanya itu, Kotagede juga terkenal sebagai tempat sentra kerajinan perak, perak di sini diolah menjadi berbagai macam kerajinan yang sekali lagi menjadi daya tarik para wisatawan baik itu lokal maupun Mancanegara. Namun pada saat gempa

melanda DIY dan karena waktu yang berjalan cukup lama, kawasan Cagar Budaya Kotagede mulai rapuh termakan zaman dan kurang mendapatkan perhatian yang khusus, tetapi dengan adanya Siter Province kerjasama antara pemerintah DIY dengan Prefektur Kyoto Jepang, maka di mulailah kerjasama untuk melestarikan kawasan Cagar Budaya Kotagede, Yogyakarta, DIY. Dengan prefektur Kyoto Jepang dalam rangka membangun kembali sector pariwisata Hubungan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Prefektur Kyoto, Jepang, telah terjalin sejak tahun 1985 tepatnya pada tanggal 16 Juli 1985 bersamaan dengan ditandatangani persetujuan untuk pembentukan Hubungan Kerjasama Persahabatan (MoU) antara kedua pemerintahan propinsi oleh Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Gubernur dan Yukio Hayashida selaku Gubernur Kyoto Prefecture, Jepang.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat di tarik sebuah rumusan masalah, yaitu :

“Bagaimana Dinamika Prefektur Kyoto Jepang dalam penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Kotagede DIY ?”

C. Kerangka pemikiran

1. Teori Hubungan Transnasional Konstelasi hubungan antar negara

dalam percaturan internasional era sekarang telah berubah dari pandangan isu “*state centric*” yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu-isu ekonomi yang lebih menguntungkan. 8

Peran Negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non negara yang semakin eksis di dalamnya. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor-aktor non negara terhadap interdependensi ekonomis. Kondisi demikian memacu masyarakat negara untuk mengembangkan pola politik luar negerinya supaya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Kerjasama internasional tersebut telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi dengan diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, hal ini makin mendesak pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan dalam negeri umumnya dan daerah di luar negeri khususnya.

8 Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal 232.

⁹Richard Falk, *A Study of Future World*, dikutip dari Mohtar Mas'ood, *Ibid*, hal 231.

Dengan melemahnya peranan aktor negara oleh aktor non negara, pemerintah daerah dalam hal ini, maka interaksi antar negara bukan lagi merupakan hubungan Internasional melainkan sebagai hubungan transnasional. Richard Falk mendefinisikan hubungan transnasional adalah perpindahan barang, informasi dan gagasan melintasi batas wilayah Nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan oleh aktor-aktor pemerintah pusat.⁹ Transnasional juga dapat diartikan jalur jamak dalam kontak antar masyarakat yang merupakan kondisi dan terjadinya ketergantungan yang kompleks. Dari definisi tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan Transnasional adalah bentuk pola kerjasama Internasional yang di dalamnya tidak lagi didominasi oleh aktor negara melainkan telah digeser oleh peranan aktor non negara yang tidak lagi terbatas oleh batas wilayah suatu negara. ⁹

Aktor non negara dalam hubungan kerjasama internasional ini dapat berupa kelompok-kelompok suku, etnis atau separatis di dalam negara, kelompok-kelompok kepentingan, perusahaan multinasional (MNC) serta bagian-bagian dari birokrasi pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa pola hubungan Transnasional di atas memungkinkan aktor non negara untuk dapat melakukan interaksi hubungan internasional. Masyarakat suatu negara dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat melakukan hubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara pemerintah pusat, walaupun hal tersebut tidak begitu vital. Dengan mengambil contoh kasus yang akan ditelaah, interaksi transnasional.

Yang terjadi adalah antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Prefektur Kyoto. Dalam pola hubungan transnasional diatas, pemerintah daerah atau *Local Government* terletak antara *Government* dan *Society* pada kedua sisi. *Local Government* tersebut kemudian saling melakukan hubungan transnasional secara langsung dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat yang berupa pelimpahan kekuasaan. *Local Government* juga dapat melakukan hubungan transnasional dengan INGO.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara yang mampu hidup sendirian, dan harus diakui bahwa hampir setiap negara mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan sendirian. Dalam penyelesaian masalah tersebut diperlukan hubungan dan atau bantuan dari negara lain untuk berbagai kepentingan nasional dan regional. Kepentingan nasional adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap 10

paling vital bagi kelestarian negara-bangsa¹⁰. Dari definisi tersebut tersirat pula bahwa di dalam kepentingan nasional terdapat pula kepentingan regional. Akan tetapi dalam kaitannya dengan hubungan internasional, maka kepentingan nasional lebih diprioritaskan dibanding kepentingan regional. Dengan kata lain, kepentingan nasional mendahului kepentingan regional¹¹.

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi amat vital bagi negara. Antara lain mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, meningkatkan prestise negara, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi¹². Di samping itu, kepentingan nasional merupakan faktor dan tujuan yang paling mendasar bagi para *decision maker* suatu Negara dalam merumuskan dan melakukan politik luar negeri. Politik luar Negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan *eksternal*, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional.

¹⁰ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations*, dalam bukunya Mochtar Mas' oed, *Ibid*, hal

¹¹ *Ibid*, hal. 143.

¹² KJ. Holsti, *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis*, hal. 136.

¹³ S.L. Roy, *Diplomacy*, hal. 31.

14 Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, hal.51.

Yang harus dicapai di luar batas wilayahnya. Politik luar Negeri adalah sebagai pengejawantahan kepentingan Nasional suatu negara terhadap negara lain¹³. Kepentingan suatu Negara sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya dan tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Strategi dan serangkaian kegiatan yang terencana dan dikembangkan oleh para *decision maker* suatu negara terhadap Negara lain atau terhadap suatu entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang berdefinisi intern bagi kepentingan nasionalnya adalah dengan politik luar negeri dari negara yang bersangkutan¹⁴. 11

15Opcit.Hal. 209.

Tujuan politik luar negeri setiap negara pasti berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya berkisar antara perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan ekonomi. Dari uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa kepentingan nasional menggambarkan aspirasi suatu negara secara operasional dalam penerapannya berupa tindakan dan kebijakan aktual yang terencana yang ditujukan untuk suatu negara. Jika dikaitkan dengan tujuan luar negeri suatu negara seperti dijelaskan di atas, maka kepentingan nasional negara manca dalam hal pemberian bantuan luar negeri kepada negara lain, dalam hal ini misalnya Indonesia, lebih diprioritaskan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan promosi pariwisata dan percepatan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi 27 Mei 2006. Lebih konkrit lagi, bantuan dari negara Jepang kepada Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama¹⁵. Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut KJ. Holsti, bantuan luar negeri berupa bantuan pinjaman uang, barang atau tenaga penasehat teknis dari sebuah negara donor merupakan instrumen kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Dalam kasus ini, bantuan yang telah diterima oleh pihak DIY adalah di bidang sosial budaya. Sedangkan bentuknya adalah berupa bantuan uang, barang dan tenaga penasehat teknis. Pada masa lampau, instrumen tersebut tidak hanya digunakan untuk kemaslahatan politik jangka pendek saja, tetapi juga prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. 12

Beberapa tipe dari bantuan luar negeri dapat berupa:

- a) Bantuan Militer, yaitu tipe bantuan tertua karena bantuan militer merupakan suatu teknik tradisional untuk mendapat sekutu.
- b) Bantuan Teknis, yaitu tipe bantuan yang paling murah karena hanya merupakan bantuan tenaga yang menyalurkan pengetahuan dan keahlian, bukan berupa materi.
- c) Bantuan Hibah, yaitu tipe bantuan ekonomi mengenai metode pengalihan modal dan barang yang diberikan secara sukarela dan yang dimaksudkan untuk tidak dikembalikan lagi.
- d) Pinjaman Pembangunan, yaitu tipe bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman modal keuangan, dan bukan bantuan. Negara penerima berkewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman atau beserta bunga dari modal awal selain dana utama yang diterima¹⁶.

16Opcit, hal. 245-250

D. Hipotesa

Hipotesa yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah:

Realisasi kerjasama sister province Prefektur Kyoto Jepang terhadap DIY dalam penanganan kawasan cagar budaya di Kotagede, Yogyakarta, DIY.

1. Bertujuan untuk menjaga kepentingan Jepang di DIY.
2. Memberikan peluang kepada pihak Jepang melalui upaya investasi dan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau pun para pengusaha Jepang di DIY, dimana nilai keuntungan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan mencapai kesejahteraan ekonomi.
3. Meningkatkan hubungan bilateral antara DIY dengan Prefektur Kyoto.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian dari penulisan ini dititik beratkan pada bagaimana Kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto dapat memberikan manfaat bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini maka jangkauan penelitian yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan proses penawaran kerjasama, persiapan kerjasama dari kedua belah pihak, realisasi kerjasama dan pemberian bantuan serta manfaat dari kerjasama tersebut dari masa 20 tahun terjalannya kerjasama yaitu pada tahun 2005 hingga saat ini.

F. Metodologi Penelitian

a. Data yang Dibutuhkan

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah masalah kerjasama dengan pokok bahasan mengenai manfaat menjalin kerjasama *Sister Province* dengan prefektur Kyoto terutama pada masa pemulihan pasca gempa bumi yang melanda DIY dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 yang lalu. Dengan demikian maka data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa terutama adalah:

1. Data pembentukan kerjasama dan pelaksanaannya.
2. Data bantuan.
3. Manfaat dari bantuan tersebut.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti tersebut di atas, dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut: 14

1. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat, mengabadikan, memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
2. Wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada responden. Dalam hal ini adalah kepala subbagian kerjasama dengan pemerintah dan lembaga luar negeri dari Biro Kerjasama Setda DIY, dan pihak lain yang berkepentingan dengan objek penelitian.

C. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara lengkap dan *reliable* sebagai data primer.

2. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian perpustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan pada masalah yang diteliti.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual), sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan yang secara lahiriah berujud susunan kata dan kalimat yang dituangkan dalam skripsi. 15

E. Cross Checking Analysis 20

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data serta hasil analisa dalam penelitian ini maka data primer, data sekunder dan foto-foto rekaman di cross check satu sama lain sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan berikut alasan kenapa hal itu terjadi.

G. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui sejauh mana manfaat dari kerjasama *Sister Province* dengan Prefektur Kyoto bagi Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pariwisata dalam hal ini dengan penanganan kawasan cagar budaya di kotagede-Yogyakarta.
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori dan membuktikan hipotesa yang ada.
3. Untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama berada di masa perkuliahan. 16

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.